

TEORI-TEORI KEBENARAN DALAM FILSAFAT Urgensi dan Signifikansinya dalam Upaya Pemberantasan Hoaks

Abdul Aziz Faradi

IAIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung
azizfaradi@gmail.com

Abstract

This article reveals the theories of truth in philosophy and the possibility of its application amid the spread of hoax and false news that is increasingly widespread in Indonesian society. The discussion starts with a socio-political background that triggers the loss of critical public reason that can no longer sort out false facts and news. Furthermore, the discussion focuses on the perspectives of truth and theories of truth that emerged and developed in the philosophical tradition. At the last point, this article ends with the possibility of applying the theories of truth in society, especially in the internet and social media.

Keywords: *Theories of truth, correspondence, coherence, pragmatism, performance and consensus*

Abstrak

Artikel ini membedah teori-teori kebenaran dalam filsafat dan kemungkinan penerapannya di tengah penyebaran hoaks dan berita palsu yang semakin luas dalam masyarakat Indonesia. Pembahasan dimulai dari latar belakang sosial politik yang memicu hilangnya nalar kritis masyarakat yang tidak bisa lagi memilah antara fakta dan berita palsu. Selanjutnya, pembahasan terfokus pada perspektif kebenaran dan teori-teori kebenaran yang muncul dan berkembang dalam tradisi filsafat. Pada akhirnya artikel ini diakhiri dengan kemungkinan penerapan teori-teori kebenaran tersebut dalam masyarakat terutama dalam internet dan media sosial.

Kata Kunci : *Teori-teori kebenaran, Korespondensi, Koherensi, Pragmatis, Performatif dan Konsensus.*

Hilangnya Nalar Kritis Masyarakat

Perhelatan pemilihan umum 2019 menghadirkan corak yang sedikit berbeda dengan pemilu sebelumnya. Tidak hanya pemungutan suara untuk memilih calon anggota legislatif dan Presiden Indonesia selaku pemimpin negara dan kepala pemerintahan dilakukan secara serentak, pesta demokrasi lima tahunan kali ini diwarnai dengan ramainya konten digital yang terindikasi sebagai berita bohong (hoaks) beredar secara luas di masyarakat. Sebuah kondisi yang ditengarai oleh para pengamat politik sebagai dampak dari budaya *post-truth politic* (politik pascakebenaran).¹

Secara sederhana kultur politik ini ditandai oleh sebuah kondisi ketika masyarakat lebih mengutamakan emosi dalam menyuarakan pilihan politik mereka, bukan pada detail kebijakan politik yang ditawarkan. Sesuai dengan definisinya, dalam politik pascakebenaran, fakta objektif dianggap kurang penting dibandingkan dengan emosi dan kepercayaan personal untuk membentuk opini masyarakat. Sesuai dengan istilah yang disematkan padanya, awalan paska- bukan berkaitan dengan waktu, tetapi bermakna pengikisan makna kebenaran itu sendiri.²

Munculnya iklim politik sejenis ini sebenarnya tidak terhindarkan. Ia merupakan konsekuensi logis dari perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi global. Meluasnya budaya ini dipicu oleh sejumlah hal secara bersamaan, antara lain: meluasnya akses informasi dari internet, intensitas siklus berita, dan perkembangan jejaring media sosial. Budaya ini ditengarai bukan hal yang baru, tetapi merupakan tradisi lama dalam politik. Budaya

¹ Pada tahun 2016, istilah ini menjadi Word of The Year Oxford Dictionary, menurut kamus daring Oxford Dictionary, post-truth sebagai didefinisikan sebagai *'relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief'*. <http://languages.oup.com> diakses 3 Mei 2019.

² *Ibid.*

politik ini menjadi lebih mudah dikenali setelah hadirnya internet dan dunia maya.³

Terbukanya gerbang informasi secara luas bagi masyarakat lewat internet ternyata menghadirkan persoalan baru. Kemajuan teknologi digital tidak hanya menyediakan sumber informasi yang benar, tetapi juga memberikan akses yang luas terhadap berita palsu, disinformasi dan hoaks.⁴ Seturut data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, terdapat lebih dari 132,7 juta pengguna aktif internet di Indonesia. Hadirnya internet membuat masyarakat bisa secara luas mendapatkan informasi yang diinginkan. Sayangnya, tidak sedikit laman dan situs yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu. Kemenkominfo, merilis data melalui situs resminya bahwa terdapat lebih dari 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar hoaks dan berita palsu.⁵

Sebagian besar situs tersebut tidak memiliki kualifikasi sebagai penyedia berita yang validitasnya bisa dipertanggung jawabkan. Ciri utama yang paling tampak dari situs-situs tersebut adalah redaksi berita yang ditayangkan berisi klaim kebenaran dan tidak adanya ruang terbuka untuk berdialog. Tugas reportase sebenarnya hanya pada upaya untuk menghadirkan fakta. Penyaji berita tidak memiliki wewenang untuk mengklam kebenaran isi berita yang disampaikan. Bisa jadi ada fakta lain yang bertentangan. Maka dibutuhkan sebuah ruang untuk membandingkan dua fakta yang bertentangan tersebut dalam sebuah dialog. Adanya ruang

³ *Ibid.*

⁴ Hal ini sebenarnya sudah lama diprediksi oleh Neil Postman lewat istilah *technopoly*, sebuah kondisi masyarakat yang dicirikan oleh adanya surplus akses ke dalam teknologi informasi. Sebuah masyarakat yang sepenuhnya menggantungkan arah kehidupannya kepada teknologi. Mereka mencari otoritas, kepuasan dan aturan dari teknologi. Neil Postman, *Technopoly, The Surrender of Culture to Technology*, (New York: Vintage Books, 1993), hlm. 71-72.

⁵ Situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, <https://kemenkominfo.go.id> diakses 3 Mei 2019.

terbuka bagi fakta lain yang bertentangan dengan konten yang ditayangkan menjadi syarat utama terwujudnya komunikasi rasional.⁶

Pada saat yang bersamaan melalui media sosial juga setiap orang bisa menyuarakan opini yang bisa jadi tidak berdasarkan fakta. Selanjutnya, berbagai macam platform media sosial menjadi semacam ruang resonansi yang membuat opini pribadi tersebut menyebar semakin luas akibat adanya fitur untuk membagikan opini tersebut bagi pihak ketiga. Intensitas penyampaian opini pribadi tersebut. Pada akhirnya, masyarakat tidak lagi mampu membedakan antara berita faktual dan berita fiktif.

Dunia maya (internet dan sosial media) yang pada awalnya merupakan simulasi dari dunia nyata pada akhirnya tercampur aduk sehingga tidak bisa lagi dibedakan dengan dunia nyata. Terjebak dalam dunia yang disebut oleh Bourdillard sebagai dunia hiperrealitas,⁷ masyarakat tidak lagi bisa membedakan antara realitas faktual dan realitas artifisial, mana yang berhubungan dengan fakta dan mana yang tidak.

Bahaya yang muncul dari budaya politik semacam ini adalah hilangnya daya kritis dan rasionalitas masyarakat. Indikator yang paling tampak dari budaya politik pascakebenaran dalam pemilihan umum 2019 adalah intensitas penggunaan isu agama dalam meraih suara partisan politik. Agama merupakan isu sensitif yang menjadi *appeal of passion* dalam diskursus politik pascakebenaran. Seteru politik dari salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden acapkali menggunakan isu agama untuk mendelegitimasi lawan politiknya. Isu

⁶ Franz Magniz Suseno, 12 Tokoh Abad ke-20, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 220-221.

⁷ Hiperrealitas merupakan sebuah kondisi yang dialami oleh masyarakat postmodern dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki, di mana kesadaran masyarakat tidak mampu memilah dan membedakan antara realitas dan fiksi. Dalam kondisi ini realitas dan fiksi tercampur aduk sehingga sulit untuk dibedakan dengan jelas. John Tiffin dan Nobuyashi Terashima, *Hypereality, Paradigm for The Third Millenium*, (London, New York: Routledge, 2005), hlm. 1.

pelarangan azan dan penghilangan mata pelajaran agama dari kurikulum sekolah disampaikan secara berulang-ulang. Akibatnya sebagian masyarakat tidak lagi bisa membedakan apakah isu tersebut merupakan fakta atau bukan. Mereka cenderung menerima isu tersebut sebagai fakta tanpa mampu mengkritisi lebih lanjut.

Di tengah sengkarut iklim politik yang tidak berlandaskan pada kebenaran faktual, kondisi masyarakat diperparah dengan minimnya, (untuk tidak mengatakan tidak ada), basis epistemologis dalam masyarakat untuk memperoleh kebenaran. Masyarakat tidak bisa memberikan garis demarkasi yang jelas antara kebenaran dan bukan karena terbiasa menerima kebenaran sebagai sebuah produk jadi. Di sinilah kemudian letak tugas penting filsafat untuk mengembalikan nalar kritis dan rasional masyarakat.

Secara garis besar pengertian filsafat dapat dipilah ke dalam dua kategori; (1) filsafat sebagai sebuah proses berpikir dan (2) filsafat sebagai sebuah produk hasil pemikiran. Filsafat sendiri pada saat yang bersamaan dapat dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu (*a group of theories*) ataupun metode berpikir (*systems of thought*).⁸ Dengan demikian, filsafat tidak boleh hanya menjadi sebuah rumusan tentang kebenaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga harus menjadi bekal bagi setiap individu dalam mengkritisi segala konsepsi yang diklaim sebagai kebenaran. Dengan kata lain, filsafat tidak hanya mewujud dalam rumusan kebenaran, tetapi harus berperan aktif dalam proses merumuskan kebenaran itu sendiri.

Perspektif Kebenaran dalam Filsafat

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, politik pascakebenaran memiliki arah yang bertentangan dengan tradisi filsafat. Di satu sisi, budaya politik pascakebenaran lebih mengutamakan terbentuknya opini publik dengan mengeksploitasi sisi emotif dan keyakinan personal masyarakat untuk mencapai target

⁸ Harold K. Titus, *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 4.

politik tanpa mengindahkan kebenaran faktual. Sementara di sisi lain, filsafat sejak era Yunani kuno selalu fokus untuk mencari dan merumuskan kebenaran sebagai orientasi arah kehidupan manusia.

Kendati demikian, kebenaran dalam filsafat tidak pernah mewujud dalam wacana tunggal. Kebenaran selalu mewujud dalam berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Kebenaran dalam perspektif rasionalisme tentu akan berbeda dengan kebenaran dalam perspektif penganut empirisme. Silang pendapat antara rasionalis dan empirisis dalam melihat kebenaran bermuara pada pertanyaan dasar tentang sumber pengetahuan manusia. Dalam diri manusia, manakah dia antara akal atau panca indera yang merupakan sumber utama pengetahuan manusia? Selain cakupan dan validitas pengetahuan, pertanyaan mendasar tentang sumber pengetahuan menjadi salah satu topik, dalam salah satu cabang filsafat, yaitu epistemologi.

Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengandaian-pengandaian dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki.⁹ Pada periode awal tradisi filsafat Yunani, epistemologi belum menjadi perhatian utama para filosof, kajian mereka lebih bersifat ontologis. Para filosof pada era ini masih terfokus pada dimensi ontologis dengan mempertanyakan manakah realitas yang sejati, dunia fisik seperti yang diyakini oleh pengusung materialisme ataukah dimensi metafisik seperti yang diusung para idealis. Baru kemudian pada masa Kant, perhatian manusia mulai bergeser dari pertanyaan ontologis mengenai apa itu realitas ke arah yang lebih epistemologis dengan mempertanyakan bagaimana pengetahuan tentang realitas bisa diakses oleh manusia.

⁹ Kenneth T. Gallagher, *The Philosophy of Knowledge (Epistemologi, Filsafat Pengetahuan)*, terj. P. Hardono Hadi, (Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1994), hlm. 5

Harold Titus¹⁰ menyebutkan tiga persoalan besar yang diperdebatkan dalam diskursus epistemologi. *Pertama*, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan yang benar itu dan bagaimana kita mengetahuinya? *Kedua*, apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apakah ia bersifat obyektif, sebagaimana para penganut obyektivisme yang menekankan pengetahuan itu bisa ada di luar pikiran kita, ataukah pengetahuan itu bersifat subyektif, sebagaimana para pengusung subyektivisme yang menyatakan pengetahuan hanya ada sejauh pikiran manusia dapat mencapainya? *Ketiga*, apakah pengetahuan kita bersifat benar (*valid*)? Pada persoalan ini, para filosof berkuat dengan validitas kebenaran dan cara untuk menguji kebenaran pengetahuan tersebut, baik melalui verifikasi maupun falsifikasi.

Untuk dapat merumuskan kebenaran syarat pertama yang harus terpenuhi adalah jaminan bahwa pengetahuan yang kita peroleh harus berasal dari sumber yang benar. Pada persoalan ini, para filosof berbeda pendapat tentang sumber pokok pengetahuan. Terjadi silang pendapat antara idealisme dan realisme, antara rasionalisme dan empirisisme. Sejarah mencatat bahwa Plato dan Aristoteles merupakan pelopor awal perseteruan antara rasionalisme dan empirisisme. Bagi Plato, pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan bersifat *a priori* dan bersumber pada akal. Ia lebih mengunggulkan dunia *idea* yang bersifat tetap sebagaimana rumus dan hukum universal matematika tinimbang dunia pengalaman empirik.

¹¹ Dalam filsafat modern, apa yang digagas oleh Plato disuarakan kembali oleh René Descartes yang dikenal sebagai punggawa rasionalisme. Menurut Descartes, pengalaman inderawi tidak bisa dipercaya sebagai sumber pengetahuan yang sejati. Menurutnya,

¹⁰ Titus, *Persoalan-persoalan Filsafat...*, hlm. 187-188

¹¹ Russell mengamini pendapat Plato bahwa pengetahuan yang pasti seperti matematika dan aritmatika tidak berasal dari persepsi inderawi. Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuni hingga Sekarang*, terj. Sigi Jatmiko dkk. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 210

pengalaman inderawi acapkali menampilkan kesan tidak seperti hakikat realitas tersebut. Pengalaman inderawi bisa menipu melalui apa yang kita kenal sebagai ilusi inderawi.

Descartes meragukan segala hukum dan tampilan inderawi yang disaksikan oleh indera manusia. Keraguan atas segala hal semacam itu merupakan sebuah keniscayaan jika manusia hendak menemukan pengetahuan yang sejati. Melalui apa yang disebut sebagai ‘keraguan metodis’ Descartes merumuskan diktum utamanya, *cogito ergo sum*, aku berpikir maka aku ada.¹² Manusia sejak lahir telah memiliki apa yang oleh Descartes dan filosof rasionalis lainnya disebut sebagai ide-ide bawaan (*innate ideas*). Pengetahuan manusia dicapai melalui proses ‘mengingat kembali’ ide-ide bawaan tersebut. Pada hakikatnya Plato tidak menafikan peranan indera dalam mencapai pengetahuan. Hanya saja, karena karena sifat pengetahuan yang bersumber dari indera bersifat tidak tetap dan berubah-ubah, oleh karena itu, indera tidak bisa dianggap sebagai sumber pokok pengetahuan.¹³

Berseberangan dengan Plato, Aristoteles menyatakan hal sebaliknya: pengetahuan sejati manusia bersumber dari kesaksian empirik. Ia menyanggah pendapat Plato tentang dunia idea yang bersifat tetap dan merupakan realitas sejati pengetahuan manusia. Aristoteles lebih menekankan peranan indera dalam mencapai pengetahuan.

Pengetahuan manusia dalam bentuk hukum universal yang bersifat tetap dicapai tidak melalui proses ‘mengingat kembali’ seperti yang diungkapkan oleh Plato. Sebaliknya, hukum universal dicapai melalui sebuah proses panjang pengamatan empirik yang disebut oleh Aristoteles dengan istilah abstraksi. Tanpa pengalaman inderawi, manusia tidak akan sampai pada rumusan intelektual-universal tersebut.¹⁴ Apa yang telah dirintis oleh Aristoteles

¹² *Ibid*, hlm. 738-740

¹³ Titus, *Persoalan-persoalan Filsafat...*, hlm. 256

¹⁴ *Ibid*.

disuarakan kembali di era modern oleh David Hume. Sosok Descartes dan Hume kemudian menjadi tokoh sentral yang melanjutkan sengketa panjang antara rasionalisme dan empirisisme.

Di tengah silang sengketa antara rasionalisme dan empirisisme itulah Immanuel Kant hadir untuk 'mendamaikan' kedua mainstream dalam diskursus epistemologi. Menurut Kant, baik rasionalisme maupun empirisisme terlalu ekstrim dalam memposisikan rasio dan pengalaman inderawi sebagai sumber utama pengetahuan manusia dengan saling menafikan satu sama lainnya. Melalui logika transendentalnya, Kant mengupayakan sebuah *prior research* untuk menemukan jalan tengah yang mengakomodasi secara proporsional dan berimbang antara rasionalisme maupun empirisisme. Kerangka filosofis yang digagas oleh Kant itulah yang dikenal dalam diskursus filsafat sebagai kritisisme.

Perubahan perspektif kebenaran dari rasionalisme, empirisisme kemudian berujung pada kritisisme adalah contoh klasik evolusi pengetahuan manusia dalam merumuskan kebenaran. Siklus ini terus berkembang sebagaimana digambarkan oleh Hegel dalam proses dialektika.¹⁵ Thesis kebenaran yang diusung sebuah masyarakat pada momen tertentu akan berhadapan dengan rumusan lain yang disebut sebagai antithesis. Selanjutnya, thesis dan antithesis akan berdialog untuk merumuskan konsepsi kebenaran baru, yaitu synthesis. Pada gilirannya konsepsi baru (synthesis) tadi akan kembali diyakini oleh masyarakat sebagai thesis kebenaran. Siklus semacam ini akan terus berlanjut tanpa titik akhir.

Teori-teori Kebenaran

Pada bagian sebelumnya terlihat jelas bahwa kebenaran dalam filsafat memiliki berbagai bentuk bergantung pada perspektif yang digunakan. Berbagai perspektif tersebut kemudian melahirkan berbagai jenis teori kebenaran. Pada bagian ini, akan dibahas

¹⁵ Albert J. Ayer dan J.O'Grady, *A Dictionary of Philosophical Quotations*, (Oxford: Blackwell Publishers, 1994), hlm. 484

berbagai teori kebenaran yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi filsafat.

1. Teori Korespondensi

Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta obyektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta obyektif yang ada.¹⁶ Fakta obyektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur, yang bisa ditangkap melalui panca indera. Sederhananya, suatu pernyataan dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pernyataan tersebut bukan kebenaran. Oleh karena sifatnya yang mengandalkan pengalaman inderawi dalam menangkap fakta, maka teori ini menjadi teori yang digunakan oleh para empirisis.

Sebagai contoh, sebuah pernyataan “di luar terjadi hujan” dianggap benar jika terdapat fakta obyektif di luar sana benar-benar terjadi hujan. Peristiwa turunnya air dari angkasa harus bisa ditangkap oleh panca indera. Jika tidak bisa ditangkap oleh panca indera, maka peristiwa hujan itu bukan merupakan fakta, melainkan hanya peristiwa delusif yang hanya berada dalam imajinasi si pemberi pernyataan.

Menurut prinsip verifikasi, semakin banyak pihak yang mengiyakan dan menyaksikan bukti faktual yang berhubungan dengan sebuah pernyataan, maka kadar kebenaran tersebut akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Prinsip verifikasi ini berguna untuk mengatasi kesalahan yang mungkin timbul pada setiap individu dalam menangkap kesan-kesan inderawi. Gula yang sejatinya manis akan terasa pahit di indera pengecap orang yang sedang sakit atau memiliki gangguan kesehatan. Oleh karena itu, pengujian terhadap fakta harus dilakukan secara terukur, berulang-ulang dan melibatkan sebanyak mungkin responden. Prinsip

¹⁶ Louis Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2204), hlm. 172-173

verifikasi ini banyak digunakan dalam metode saintifik untuk mengatasi kelemahan inderawi dalam menangkap fenomena faktual.

2. Teori Koherensi

Pembuktian secara berulang-ulang pada teori korespondensi pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang pada umumnya berwujud sebagai kebenaran umum (*general truth*). Matahari terbit dari arah timur. Pernyataan tersebut merupakan sebuah kebenaran umum karena sudah diyakini benar. Kita tidak perlu menunggu hingga esok pagi untuk membuktikan secara faktual bahwa matahari benar-benar terbit dari ufuk timur. Aksioma atau postulat adalah sebuah pernyataan yang dianggap sudah terbukti benar dan tidak perlu dibuktikan lagi. Karena sifat itulah ia dijadikan sebagai dasar dalam disiplin ilmu matematika dan bisa digunakan untuk membuktikan apakah pernyataan lain benar atau tidak.

Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan (kontradiksi) antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi.¹⁷

Sebagai contoh, di dalam disiplin ilmu matematika terdapat postulat bahwa jumlah sudut semua jenis bangun ruang segitiga berjumlah 180° . Jika ada satu pernyataan bahwa terdapat satu bentuk segi tiga yang jumlah sudutnya 210° , maka tanpa harus menyaksikan bukti faktual segitiga tersebut kita bisa menyatakan bahwa pernyataan orang tersebut tidak benar karena ia bertentangan dengan postulat. Pernyataan orang tersebut memiliki kontradiksi dengan postulat yang sudah ada.

Perbedaan teori ini dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi dasar

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 174. Lihat juga Zaprul Khan, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 107-116.

kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada, sedangkan pada teori koherensi pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Contoh lainnya, seseorang memberi pernyataan bahwa di dalam kolam alun-alun kota terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup. Menurut teori korespondensi, untuk menentukan pernyataan tersebut benar atau tidak, kita harus menunggu fakta apakah di dalam kolam tersebut terdapat seekor ikan hiu yang masih hidup atau tidak. Sementara menurut teori koherensi, tanpa menunggu fakta, kita bisa menentukan pernyataan orang tersebut tidak benar karena bertentangan dengan aksioma yang sudah ada sebelumnya bahwa ikan hiu adalah jenis ikan air asin (laut). Tidak logis jika ikan air asin bisa hidup dalam air kolam alun-alun kota yang merupakan kolam air tawar.

3. Teori Pragmatis

Teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta obyektif dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan obyek pengetahuan metafisik. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap kaum positivis yang menganggap pernyataan metafisik sebagai pernyataan yang tidak bermakna (*meaningless*) karena ia tidak memiliki dasar faktual di dunia empiris.

Menurut kaum pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Neraka ada bagi manusia yang berperilaku jahat. Terlepas dari ketiadaan bukti empiris tentang neraka, pernyataan itu bisa dianggap sebagai pernyataan yang benar karena memiliki manfaat dalam menurunkan angka kejahatan.

Terkait dengan teori kebenaran, Charles Peirce, salah satu tokoh pragmatisme menjelaskan bahwa kriteria berlaku dan memusakan sebagai dasar kebenaran dalam pragmatisme digambarkan secara beragam dalam berbagai sudut pandang.¹⁸ Beragamnya sudut pandang dalam menentukan hasil yang memuaskan akan berujung pada beragamnya standar kebenaran. Kebenaran menurut saya belum tentu benar menurut orang lain karena apa yang memuaskan bagi saya belum tentu memuaskan bagi orang lain. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat teori pragmatisme rentan terjebak dalam relativisme. Inilah salah satu dari beberapa kritik yang diarahkan pada teori pragmatisme.¹⁹

4. Teori Performatif

Teori kebenaran performatif muncul dari konsepsi J. L. Austin yang membedakan antara ujaran konstatif dan ujaran performatif. Menurut tokoh filsafat analitika Bahasa dari Inggris ini, pengujian kebenaran (*truth-evaluable*) secara faktual seperti yang dapat diterapkan dalam teori korespondensi hanya bisa diterapkan pada ujaran konstatif. Ucapan konstatif adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstatif dalam ujaran itu sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya.²⁰

Sementara itu, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena keterbatasan masyarakat untuk mengakses fakta yang terjadi. Selain keterbatasan akses kepada fakta, ketidakbisaan sebuah ujaran untuk dibuktikan juga bisa disebabkan karena sebuah ujaran berkaitan dengan kondisi atau aktivitas mental seseorang. Ketika seseorang berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama kelak di kemudian hari, kita tidak bisa

¹⁸ William James, "Pragmatism's Conception of Truth", dalam William James (Ed.), *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*, (New York: Longman Green and Co., 1907), hlm. 76-91.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ John Langshaw Austin, *How to Do Things with Words*, (Oxford: Clarendon Press, 1962), hlm. 5.

membuktikan apakah ia berjanji sungguh-sungguh seperti yang ia ucapkan atau tidak. Kesungguhan dalam janji adalah aktivitas mental dan oleh karena itu tidak bisa dibuktikan.

Untuk hal-hal ini, Austin mengenalkan jenis ujaran performatif.²¹ Ujaran-ujaran ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta obyektif maupun konsistensi logis yang dikandungnya, melainkan berkaitan dengan layak atau tidaknya ujaran tersebut dikeluarkan oleh sang penutur. Atas dasar itulah kebenaran performatif mengandalkan otoritas penutur sebagai dasar kebenarannya. Otoritas ini bisa dimaknai sebagai adanya wewenang, kepakaran atau kompetensi sang penutur dalam hal yang diungkapkan dalam ujarannya.

Contoh yang paling umum dari jenis kebenaran performatif adalah penentuan awal bulan Ramadan. Awal masuknya bulan Ramadan ditentukan melalui fakta munculnya hilal (bulan muda) yang merupakan awal pergantian bulan yang sekaligus menjadi pertanda dimulainya ibadah puasa bagi umat muslim. Kendati kemunculan hilal merupakan fakta obyektif dijadikan sebagai dasar kebenaran penentuan awal Ramadan (sebagaimana pembuktian pada teori korespondensi), terdapat keterbatasan akses bagi orang awam untuk membuktikan melalui pencerapan inderawi. Jatuhnya awal Ramadan tidak dibuktikan oleh masyarakat dengan menyaksikan langsung fakta kemunculan hilal, tetapi melalui pernyataan menteri Agama yang dianggap memiliki otoritas untuk menentukan awal Ramadan.

5. Teori Konsensus

Teori kebenaran consensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Penulis buku *The Structure of Scientific Revolutions* ini menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui beberapa tahapan. Pertama, ilmu

²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

pengetahuan berada pada posisi sebagai *normal science* ketika ia diterima oleh masyarakat berdasarkan konsepsi kebenaran ilmiah. Pada perkembangannya, akan muncul beberapa anomali yang membuat konsepsi kebenaran tersebut dipertanyakan keabsahannya. Selanjutnya akan terjadi revolusi ilmu pengetahuan yang juga menyebabkan pergeseran paradigma (*shifting paradigm*) dalam masyarakat ilmiah. Singkat kata, perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan adanya pergeseran paradigma lama yang digantikan oleh paradigma baru. Pergeseran tersebut ditentukan oleh penerimaan masyarakat (*social acceptance*) terhadap sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah.²²

Berdasarkan konsepsi Kuhn di atas, sebuah teori ilmiah dianggap benar sejauh ia mendapat dukungan atau terdapat kesepakatan (konsensus) dalam masyarakat ilmiah terhadap kebenaran teori tersebut. Inilah yang disebut teori kebenaran konsensus. Teori ini selanjutnya dikembangkan juga oleh Jurgen Habermas melalui konsep pemikirannya tentang komunikasi rasional. Senada dengan Kuhn, menurut Habermas, kebenaran sebuah pernyataan ditentukan oleh ada tidaknya kesepakatan di antara partisipan rasional komunikatif dalam sebuah diskursus.²³

Aplikasinya Dalam Masyarakat

Berbagai teori kebenaran yang telah dipaparkan sebelumnya, sekali lagi, menunjukkan pluralitas kebenaran dalam filsafat. Adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang validitas kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam oposisi biner, hitam-putih, benar-salah. Ada kemungkinan bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan bersifat gradatif. Semakin

²² Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, (Chicago: University of Chicago Press, 1962), hlm. 58-61.

²³ Magniz Suseno, *12 Tokoh...*, hlm. 220-221.

banyak ia sesuai dengan teori kebenaran yang ada, semakin tinggi validitas kebenaran yang dikandungnya. Demikian juga sebaliknya.

Tantangan selanjutnya yang akan dihadapi adalah sejauh mana teori-teori kebenaran tersebut bisa diaplikasikan dalam menyaring berita palsu. Tentu saja penerapan teori-teori tersebut bergantung pada kondisi obyek kebenaran itu sendiri. Teori korespondensi misalnya, bisa diterapkan selama obyek kebenaran bersifat faktual dan bisa diakses secara langsung melalui panca indera. Jika tidak bisa diakses langsung, masih terdapat opsi teori kebenaran lain yang bisa diterapkan.

Dalam konteks dunia maya, pembuktian kebenaran dilakukan melalui gambar atau video. Tetap ada kemungkinan bahwa gambar atau video tersebut adalah palsu sehingga diperlukan fakta lain sebagai pendukung atau pembanding. Selain itu, dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pakar telematika untuk membuktikan validitas data faktual (gambar atau video) tersebut. Dalam hal ini penerapan teori performatif jelas signifikansinya. Teori performatif juga bisa diterapkan untuk menyaring sumber berita. Jika terdapat berita yang terkait dengan isu-isu tertentu, akan lebih bijak jika kita melakukan konfirmasi kepada pihak yang memiliki otoritas di bidang tersebut.

Ketika kita mendapatkan dua atau lebih pernyataan atau yang bertentangan, maka penerapan teori koherensi sangat diperlukan. Pernyataan yang dianggap benar tentu saja adalah pernyataan yang konsisten dengan berita lain yang sudah terbukti sebelumnya sebagai berita yang benar. Berdasarkan asas kemanfaatan, kita tentu saja boleh membagikan berita yang diasumsikan akan bermanfaat bagi orang lain, tentu saja dengan catatan bahwa berita tersebut telah melalui uji korespondensi, koherensi ataupun uji performatif sebelumnya.

Sedangkan teori consensus bisa diterapkan untuk menyaring situs atau portal berita yang tidak mencukupi syarat bagi terbentuknya komunikasi rasional. Situs atau portal berita semacam

ini biasanya dicirikan dengan adanya klaim kebenaran dalam reportase beritanya dan tidak menyajikan fakta yang berimbang.

Daftar Pustaka

Austin, John Langshaw, *How to Do Things with Words*, (Oxford: Clarendon Press, 1962)

Ayer, Albert J. dan J,O'Grady, *A Dictionary of Philosophical Quotations*, (Oxford: Blackwell Publishers, 1994).

Gallagher, Kenneth T., *The Philosophy of Knowledge (Epistemologi, Filsafat Pengetahuan)*, terj. P. Hardono Hadi, (Yogyakarta: Penerbit Kansius, 1994).

James, William (Ed.), *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*, (New York: Longman Green and Co., 1907).

Kattsoff, Louis, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).

Kuhn, Thomas. *The Structure of Scientific Revolution*, (Chicago: University of Chicago Press, 1962).

Postman, Neil, *Technopoly, The Surrender of Culture to Technology*, (New York: Vintage Books, 1993).

Russell, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuni hingga Sekarang*, terj. Sigi Jatmiko dkk. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004).

Suseno, Franz Magniz, *12 Tokoh Abad ke-20*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

Tiffin, John dan Nobuyashi Terashima, *Hyperreality, Paradigm for The Third Millenium*, (London, New York: Routledge, 2005).

Titus, Harold K., *Persoalan-persoalan Filsafat*, terj. H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Abdul Aziz Faradi: Teori-Teori Kebenaran Dalam Filsafat...

Zaprulkhan, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

<http://languages.oup.com>

<https://kemenkominfo.go.id>